



JOROK: Salah satu jalan rusak di Kota Denpasar, yakni Jalan Pulau Seram.

## Soal Jalan Rusak, Pemkot Ngaku "Miskin"

**DENPASAR** - Rusaknya 73,2 kilometer dari total 486 kilometer jalan kota di Kota Denpasar belum mendapat penanganan serius. Anggarannya pun minim. Dari kebutuhan Rp 400 miliar, Dinas PU hanya diberikan Rp 50 miliar. Kabag Humas dan Protokol Setkot Denpasar IB

Rahoela mengaku Pemkot Denpasar "miskin" alias memiliki keterbatasan dana.

"Pemerintah *kan* kemampuan dananya terbatas, sedangkan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Kota Denpasar itu banyak. Dan karena ini kami menggunakan skala prioritas," ungkap Rahoela dikonfirmasi *Jawa Pos Radar Bali* saat ditemui di kantornya Rabu kemarin (20/7).

Rahoela tidak bisa memungkiri jalan rusak ada di Kota Denpasar tersebut. Meski demikian, dia mengaku di Perubahan APBD 2016 anggaran perbaikan jalan dinaikkan menjadi Rp 100 miliar. Katanya, yang dibiayai Pemkot Denpasar berdasarkan skala prioritas. "Tentu kami tidak bisa (memperbaiki) secara keseluruhan, di sinilah kami butuhkan partisipasi dari masyarakat, untuk bersama-sama memelihara jalan," ujarnya. (ara/yor)

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 23



## Jaksa Tahan Koruptor Pelestari Rumah Budaya

**SINGARAJA** - Tersangka dugaan korupsi dana pelestarian rumah budaya akhirnya ditahan kejaksaan negeri Buleleng, yakni Ketut Swandita, 60, dan Made Sudarisma, 56. Keduanya resmi ditahan, Rabu (20/7) kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Sumarjo yang di dampingi Kasi Pidsus Indra Harvianto mengatakan jika kasus tersebut berawal saat adanya kucuran dana APBN dari Kemendikbud tentang pelestarian rumah budaya pada 2013 silam. Saat itu Swandita yang menjabat selaku Ketua organisasi pelestarian seni budaya Buleleng Banda Sawitra di Desa Kedis mengajukan proposal senilai Rp 495 juta. Selanjutnya dana tersebut pun cair dengan SK No. 3045/SK/SNB/BUD/X/2013 yang disimpan di salah satu Bank pemerintah. "Kemudian penarikan dana ini pun bertahap selama dua kali, Swandita meminta bendaharanya yakni Sudarisma menarik di tahap pertama senilai Rp 100 juta pada

tanggal 21 November 2013, selanjutnya pada 25 November kembali divarikan sebanyak Rp 395 juta," ujarnya.

Setelah proyek berjalan, pada 2015 BPKP menemukan kejanggalan dalam hal pertanggungjawaban proposal tersebut. Di mana dana yang terpakai hanya Rp 319 juta lebih. Sedangkan sisa dari anggaran senilai Rp 175 juta lebih tidak jelas peruntukannya. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kejari Buleleng, ditemukan jika dana senilai Rp 69 juta ini digunakan untuk kepentingan pribadi Swandita yang juga menjabat sebagai bendesa adat Desa Kedis. Sedangkan Sudarisma selaku bendahara yang bertugas sebagai pemindahan uang dari rekening rumah budaya ke rekening pribadi milik Swandita menikmati keuntungan senilai Rp 3 juta. "Sisa dari anggaran itu tidak jelas pertanggung jawabannya. Saat ini kasus tersebut sudah berstatus



ZULFIKA RAHMAN/RADAR BALI

**TAK BERKUTIK:** Ketut Swandita, tersangka dugaan korupsi dana pelestarian rumah budaya ditahan Kejaksaan Negeri Buleleng kemarin.

P21 dan keduanya resmi ditahan," jelas Sumarjo kepada awak media. Diakuinya, jika ada pengembalian

dana dari para tersangka senilai Rp 82 juta. Namun, itu tidak menghentikan proses hukum. (zul/gup)

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 29



# Desa Timuhun Diminta Kembalikan Dana

## Gerbangsadu, Rp 45 Juta Sudah Jadi Bangunan

**SEMARAPURA** - Dana Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) yang digelontor Pemprov Bali ke Desa Timuhun Kecamatan Banjarangkan, sebesar Rp 45 juta membuat bingung warga setempat. Dana yang sudah digunakan untuk membangun kantor Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ternyata harus dikembalikan lagi.

Perbekel Desa Timuhun I Putu Arsana, menyatakan, Desa Timuhun mendapatkan gelontoran dana Gerbangsadu dengan total Rp 1,02 miliar. Dari miliaran dana itu, baru Rp



45 juta yang cair.

Setelah dana itu cair, pihak desa menggunakan dana itu untuk membangun kantor Bumdes. Tiba-tiba saja, setelah pembangunan kantor rampung, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMPKBPD) Klungkung meminta mengembalikan dana itu.

Tentu saja, arahan dari BPMPKBPD Klungkung mem-

**Kalau mengembalikan dana itu di mana kami mencarinya. Kami bingung, karena dananya sudah jadi bangunan kantor Bumdes."**

**I PUTU ARSANA**  
Perbekel Desa Timuhun

buat pihak desa Timuhun kaget bukan kepalang. "Kalau mengembalikan dana itu di mana kami mencarinya. Kami bingung, karena dananya sudah jadi bangunan Kantor Bumdes," keluh Arsana di dampingi Sekretaris Bumdes Tri Jenaka, Dewa Ayu Damiasih, kemarin (20/7). Padahal, sebelum pencairan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi Bali. "Dari pihak pemberi dana Rp

45 juta itu bisa digunakan untuk membangun gedung dan ATK," jelasnya.

Lanjut dia, BPMPKBPD Klungkung beralasan Pemkab Klungkung belum memiliki Surat Keputusan (SK) Pencairan. Sehingga, untuk mencari aman, dana Gerbangsadu diminta dikembalikan ke Pemprov. Tentu saja, pihaknya menilai pencairan dana tersebut sia-sia saja.

Keresahan kedua juga muncul, pasalnya, sisa dana Rp 975 juta yang belum cair sudah dinantikan oleh warga miskin di desa itu. Warga setempat yang sudah dijanjikan pun harus gigit jari jika Gerbangsadu dikembalikan. "Banyak warga miskin yang menjadi calon peminjam tak kunjung mendapatkan dana," teran-

gnya. Akibat permasalahan itu, menjadi pertanyaan bagi warga setempat. "Saya selaku Kades (Perbekel) selalu menjadi bulan-bulanan warga yang menanyakan soal dana yang tak kunjung cair," pungkasnya.

Di bagian lain Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta akan mengecek permasalahan itu. "Ya, kami akan segera turun," ujar Suwirta singkat.

Adapun fungsi dari Gerbangsadu ada empat point. Pertama menumbuhkan kreatifitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam; menyediakan prasaranadan sarana peningkatan usaha ekonomi; meningkatkan usaha mikro dan mengurangi pengangguran; dan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. (dra/gup)

Edisi : Kamis, 21 Juli 2016

Hal : 22